



KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM

FARIDA S.Pt., S.Ap., M.Si.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. S1 – ILMU NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK - UNIVERSITAS MATARAM
2. S1- ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - UNIVERSITAS DWIPAYANA
3. S2 – ILMU KEBIJAKAN PUBLIK - UNIVERSITAS DWIPAYANA

RIWAYAT JABATAN:

1. STAF MENTERI URUSAN PANGAN RI TAHUN 1996 – 1998
2. STAF MENTERI URUSAN HAM RI TAHUN 1998 – 2000
3. STAF DIREKTORAT KERJA SAMA HAM, KEMENKUMHAM TAHUN 2001 -2009
4. KASI KONVENSİ INTERNASIONAL HAM, KEMENKUMHAM TAHUN 2010-2014
5. KASI EVALUASI DAN PELAPORAN HAK KELOMPOK RENTAN. DITJEN HAM TAHUN 2015-2016
6. KEPALA SUB DIREKTORAT (KASUBDIT) INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA. DIREKTORAT INSTRUMEN HAM, DIREKTORAT JENDERAL HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2017 – 2020
7. ANALIS KEBIJAKAN MADYA/KOORDINATOR INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA/ANALIS KEBIJAKAN MADYA TAHUN 2021 – 2023
8. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA TAHUN 2024 - SEKARANG
9. PELATIHAN HAM KERJA SAMA KEMENKUMHAM DAN AUSAID TAHUN 2000
10. PELATIHAN FASILITATOR HAM TAHUN 2002
11. FASILITATOR HAM KERJA SAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAN IOM DI DAERAH KONFLIK AMBON, POSO, PALANGKARAYA, TERNATE DAN ACEH TAHUN 2003-2005
12. TIM FASILITATOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADA PEMULANGAN GERAKAN ACEH MERDEKA TAHUN 2004 - 2005
13. TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2012 -2015 SEBELUM DIINTEGRASIKAN DALAM RANHAM TAHUN 2015 – 2019
14. TIM PENYUSUN STRANAS KELANJUTUSIAAN TAHUN 2015
15. TIM PENYUSUN UNDANG-UNDANG 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2014 -2015
16. EVALUATOR KOTA LAYAK ANAK (KPPPA) KE BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2016 -2023
17. PERIODE 2012 -2018 TIM PENYUSUN LAPORAN KONVENSİ ANAK (CRC),

KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) DAN KONVENSI HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DILAPORKAN KE KOMITE HAM PBB

18. PELATIHAN DESIMINATOR HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2017
19. FASILITATOR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TAHUN 2017
20. TAHUN 2018 FASILITATOR PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (KEMENKO PMK DAN KPPPA)
21. TRAINER OF TRAINER (TOT) ISU PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DENGAN PERHIMPUNANAN JIWA SEHAT, KEMENTERIAN SOSIAL DAN AIPJS TAHUN 2018
22. TIM PENYUSUN REGULASI/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK ISU ANAK, PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS DITJEN HAM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, TAHUN 2016-2020
23. TIM PENYUSUN LAPORAN KOVENAN HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA KE KOMITE HAM PBB TAHUN 2018- 2020
24. TIM PENYUSUN LAPORAN KONVENSI PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA KE KOMITE HAM 2020 - 2023
25. TIM PENYUSUN LAPORAN UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) KE KOMITE HAM 2018- 2023
26. HINGGA SAAT INI MENGAWAL PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DITINGKAT PUSAT DAN DAERAH TERKAIT ISU ANAK, PEREMPUAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEKERJA MIGRAN, HIV/AIDS DAN ISU HAM LAINNYA
27. SAAT INI AKTIF MENGINIASI IMPLEMENTASI GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION BERBASIS HAM DAN RESPONSIF GENDER DITINGKAT PUSAT DAN DAERAH BERSAMA UN WOMEN. IOM DAN UNDP
28. ANGGOTA TIM LAYANAN ADVOKASI BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MASYARAKAT ADAT TAHUN 2022
29. TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023
30. MENJADI PENGAJAR HAM DI DI BPSDM TAHUN 2021 - 2023
31. AKTIF SEBAGAI PEMBICARA KHUSUSNYA UNTUK ISU ANAK, PEREMPUAN, PENYANDANG DISABILITAS, KEBIJAKAN DISKRIMINATIF, PELAPORAN INSTRUMEN HAM INTERNAIONAL, INSTRUMEN HAM, INDEKS HAM DAN ISU HAM LAINNYA.
32. TIM PEMRI DALAM PERTEMUAN MENGENAI ISU PENYANDANG DISABILITAS ASEAN DI KAMBOJA DAN VIETNAM, TAHUN 2014
33. SHORT COURSES (3 BULAN) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST AUSTRALIA TAHUN 2016
34. TIM PEMRI DALAM PERTEMUAN MENGENAI ISU PENGUNGSI ANAK ASEAN DI THAILAND TAHUN 2019
35. TIM PEMRI DALAM PERTEMUAN MENGENAI ISU PENGUNGSI ANAK ASEAN DI MALAYSIA TAHUN 2022
36. SEBAGAI DELEGASI PEMERINTAH INDONESIA PADA SOUTHEAST ASIA REGIONAL WORKSHOP ON HIV-RELATED STOGMA AND DISCRIMINATION PADA TANGGAL 4 – 7 JUNI DI BANGKOK THAILAND
37. SEBAGAI KOORDINATOR PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 22 TAHUN 2021 TENTANG KRETERIA DAERAH KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
38. SEBAGAI KOORDINATOR TIM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN RI NO. 99 TAHUN 2020 TENTANG KELOMPOK KERJA PELAPORAN INSTRUMEN UTAMA DAN MEKANISME HAK ASASI MANUSIA

INTERNASIONAL

39. SEBAGAI KOORDINATOR PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. M..HH.01.HA.04.02 TAHUN 2021 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM (POKJA P5HAM) BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN IMPLEMENTASI PENYUSUNAN PETA JALAN P5HAM BAGI PDM SAMPAI TAHUN 2026
40. SEBAGAI KOORDINATOR PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.M.HH.02.HA.04.02 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN INDEKS HAM INDONESIA DAN PENYUSUNAN DAN PENGHITUNGAN INDEKS HAM INDONESIA YANG MENJADI PRIORITAS NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMPAI TAHUN 2025
41. SEBAGAI KOORDINATOR PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 23 TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM
42. SEBAGAI KETUA TIM PENYUSUNAN INDEKS HAM INDONESIA SEJAK TAHUN 2021 – 2023
43. SEBAGAI KOORDINATOR KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN REGULASI/KEBIJAKAN DISKRIMINATIF BERSAMA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMNAS PEREMPUAN SEJAK TAHUN 2021 – SEKARANG
44. SEBAGAI KOORDINATOR PENYUSUNAN PEDOMAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PANTI REHABILITAS PADA TAHUN 2023 – SEKARANG
45. SEBAGAI KOORDINATOR PENYUSUNAN DRAFT PETA JALAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA TAHUN 2022 – SEKARANG



KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN

HERMAN SAWIRAN, Bc.I.P., S.H., M.H.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. DIII AKIP
2. S-1 ILMU HUKUM
3. S-2 ILMU HUKUM

RIWAYAT JABATAN:

1. KASI REGISTRASI LP. PALEMBANG
2. KA. CABRUT BATURAJA DI MUARA DUA CABRUT MUARA DUA
3. KEPALA RUTAN KELAS IIB PURBALINGGA
4. KEPALA LAPAS KELAS III BANYU ASIN
5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN NAPI LAPAS KELAS I MADIUN
6. KEPALA LAPAS KELAS IIB SEKAYU
7. KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN PEMASYARAKATAN, PENGENTASAN ANAK, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
8. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA
9. KEPALA BAGIAN UMUM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
10. KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT
11. KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB



KEPALA DIVISI ADMINISTRASI

MUSLIM ALIBAR, S.Sos., M.Si.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. Sosial Politik / Adm. Negara Univ. Tanjung Pura Pontianak (S1)
2. Kebijakan Publik Univ. Indonesia - FISIP (S2)

RIWAYAT JABATAN:

1. KASUBBAG ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN, SETJEN
2. KASUBBAG PEMBERHENTIAN DAN DISIPLIN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN, SETJEN
3. KEPALA SUBBAG ADMINISTRASI DISIPLIN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN
4. KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI IV BIRO KEPEGAWAIAN
5. KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN
6. KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN.
7. ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA
8. KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG
9. KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB



KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

WISHNU DARU FAJAR,S.H.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. S1 HUKUM PIDANA SARJANA HUKUMUNTAG SEMARANG

RIWAYAT JABATAN:

1. KEPALA SUB SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KANIM KELAS II MALANG
2. PEJABAT PENYIDIK MERANGKAP KASUBSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KANIM KELAS II MALANG
3. KEPALA SUB SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KANIM KELAS I MALANG
4. KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PENGKAJIAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN
5. KEPALA SEKSI REGISTRASI DISTRIBUSI DOKUMEN KEIMIGRASIAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN
6. KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN DISTRIBUSI DOKUMEN DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN
7. KEPALA KANIM KELAS II TANJUNG UBAN
8. KEPALA BIDANG LALU LINTAS, IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
9. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
10. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
11. KEPALA BIDANG INTELIJEN, PENINDAKAN, INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO
12. KEPALA BIDANG INTELIJEN, PENINDAKAN, INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
13. KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
14. KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
15. KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
16. KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB